

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Manajemen Pendidikan

Manajemen pendidikan terbentuk dari dua kata manajemen dan pendidikan. Manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat, dan profesi. Dikatakan Sagala (2012:3) sebagai profesi karena manajemen dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai suatu prestasi menejer dan para profesionalnya dituntut oleh suatu kode etik.

Teori manajemen menurut para ahli, Parker (Stoner dan Freeman, 2000) “*Manajemen is the art of getting things done trough people*”. Teori di atas menurut Usman (2013:6) manajemen adalah sebuah seni melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang. Menurut Usman (2013:13) manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai seni dan illmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efesien. Sumber daya pendidikan adalah sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi:

- a. *Man* (SDM) atau manusia adalah unsur terpenting yang perlu dikelola dalam manajemen pendidikan, pengelola yang biasa dilakukan misalnya dengan mengorganisasikan manusia dengan melihat apa yang menjadi keahlian orang tersebut.

- b. *money* (uang) dimaksudkan untuk mengelola pendanaan atau pembiayaan secara efisien sehingga tidak terjadi pemborosan dalam suatu lembaga pendidikan.
- c. *Materials* (bahan) merupakan aspek yang tidak kalah penting dalam manajemen pendidikan, melalui pengelolaan material maka bisa terbentuk kurikulum yang berisi panduan dasar untuk mentransfer ilmu dari guru ke siswa.
- d. *Machines* (mesin) bertujuan untuk dapat mengelola mesin yang dipergunakan untuk mendukung proses belajar mengajar supaya dapat digunakan sebaik mungkin dan tidak dapat mengalami kerusakan, untuk orang yang mengelola mesin biasanya harus orang yang benar-benar mengerti cara merawat mesin tersebut dengan baik.
- e. *Methods* (metode) harus dilakukan dengan baik, metode yang digunakan untuk mengajar guru di sekolah satu dengan guru di sekolah lain tidak sama karena tergantung pada kesiapan siswa yang diajar.
- f. *Market* (pasar) adalah salah satu kunci yang menentukan sekolah atau lembaga pendidikan yang besar atau kecil, pasar yang dimaksud adalah masyarakat secara luas, sasaran yang dituju adalah masyarakat yang berniat menyekolahkan putra putri mereka.
- g. *Minute* atau waktu, perlu dikelola dengan baik karena waktu belajar peserta didik di sekolah sangat terbatas, sehingga perlu pengelolaan yang baik supaya waktu belajar mengajar menjadi lebih efisien.
- h. *Information* (informasi) merupakan hasil pemrosesan data yang di peroleh dari setiap elemen sistem tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami dan

merupakan pengetahuan yang relevan dan dibutuhkan dalam pemahaman fakta-fakta yang ada fakta yang tercatat dan selanjutnya dilakukan pengolahan menjadi bentuk yang berguna atau bermanfaat untuk mencapai tujuan organisasi.

Manajemen Pendidikan dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai proses analisis kebutuhan, penyusunan program, pembagian tugas pelaksan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif, efisien, mandiri, dan akuntabel.

2.2 Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Implementasi MBS dewasa ini sedang menjadi pusat perhatian para pengelola pendidikan, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/ kota, sampai dengan tingkat sekolah. Landasan yuridis pelaksanaan MBS adalah Undang-Undang Nomer 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dan peraturan pemerintah pusat dan daerah otonom. Produk hukum tersebut mengamatkan pergeseran kewenangan pengelolaan pendidikan dan melahirkan wacana akuntabilitas pendidikan. Sagala dalam Rini (2011:3) mengatakan bahwa konsep MBS perlu memperhatikan kajian, penelitian dan strategi yang bertujuan agar otonomi sekolah dan partisipasi masyarakat mempunyai keterlibatan yang tinggi dengan kerangka dasar dalam meningkatkan mutu.

Menurut Nanang Fatah (2012:32) MBS merupakan pendekatan politik yang bertujuan untuk mendesain ulang pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, komite sekolah,

orang tua siswa dan masyarakat. Manajemen berbasis Sekolah mengubah sistem pengambilan keputusan dengan memindahkan otoritas dalam pengambilan keputusan dan manajemen ke setiap yang berkepentingan di tingkat *Local Stakeholder*.

Caldwel dalam Rini (2011:8) mengartikan Manajemen Berbasis Sekolah adalah desentralisasi yang sistematis pada otoritas dan tanggung jawab tingkat sekolah untuk membuat keputusan atas masalah signifikan terkait penyelenggaraan sekolah dalam kerangka kerja yang ditetapkan oleh pusat terkait tujuan kebijakan, kurikulum, standar, dan akuntabilitas. Jadi sekolah harus mengontrol semua sumber daya dan menggunakan secara lebih efisien sumber daya tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat bagi peningkatan mutu khususnya. sementara itu, kebijakan makro yang dirumuskan oleh pemerintah atau otoritas pendidikan lainnya masih diperlukan dalam rangka menjamin tujuan-tujuan yang bersifat nasional dan akuntabilitas yang berlingkup nasional sehingga disimpulkan bahwa MBS merupakan bentuk bentuk otorita sekolah untuk melaksanakan serangkaian kegiatan sekolah dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan *stakeholders* untuk mencapai tujuan sekolah.

Tujuan utama Manajemen Berbasis Sekolah adalah meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orang tua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru, adanya hadiah dan hukuman sebagai kontrol, serta hal lain yang dapat menumbuhkan. Sementara itu baik berdasarkan kajian pelaksanaan dinegara-negara lain, maupun

yang tersurat dan tersirat dalam kebijakan pemerintah dan UU sisdiknas NO. 20 Tahun 2003, tentang Pendidikan Berbasis Masyarakat pasal 55 ayat 1: Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan pasal tersebut setidaknya ada empat aspek yaitu: *kualitas* (mutu) dan *relevansi*, *keadilan*, *efektifitas* dan *efisiensi*, serta *akuntabilitas*.

2.3 Fungsi Manajemen Sekolah

Fungsi manajemen sekolah sebenarnya merupakan penerapan fungsi-fungsi manajemen yang diaplikasikan di sekolah oleh kepala sekolah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Terry (2012:159), fungsi-fungsi manajemen itu meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

2.3.1 Perencanaan (*planning*)

Menurut Handoko dalam Ambarita (2013:19) perencanaan (*planning*) adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Ada tiga tahap dalam kegiatan penyusunan program: 1) menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan; 2) tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan; 3) waktu dan biaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2.3.2 Pengorganisasian (*organizing*)

Menurut Handoko dalam Daryanto (2013:86) pengorganisasian (*organizing*) adalah suatu proses untuk merancang stuktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi, agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien. Langkah pengorganisasi meliputi: 1) pemerincian seluruh pekerjaan yang harus dilakukan ; 2) pembagian beban pekerjaan; 3) pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengordinasi pekerjaan para anggota organisasi menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis.

2.3.3 Pelaksanaan (*actuating*)

Menurut Terry dalam Ambarita (2013:23) mengemukakan bahwa pelaksanaan (*actuating*) adalah usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran organisasi. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan (*actuating*) adalah seorang guru atau karyawan tata usaha akan termotivasi untuk mengerjakan sesuatu jika: (1) merasa yakin akan mampu mengerjakan; (2) yakin bahwa pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi dirinya; (3) tidak sedang dibebani oleh problem pribadi atau tugas lain yang lebih penting, atau mendesak; (4) tugas tersebut merupakan kepercayaan bagi yang bersangkutan; dan (5) hubungan antar teman dalam organisasi tersebut harmonis. Fungsi *actuating* tidak lepas dari fungsi manajemen melalui penentuan masalah, penetapan tujuan, penetapan tugas dan sumber daya penunjang, menggerakkan dan mengarahkan, memiliki keberhasilan SDM. Elemen-elemen pengarahan dalam manajemen adalah: 1) *coordinating*, 2) *motivating*, 3) *communication*, 4) *commanding*.

Pengarahan merupakan usaha untuk mengerakkan anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran organisasi yang bersangkutan dan anggota organisasi tersebut karena itu ingin mencapai sasaran tersebut.

2.3.4 Pengawasan (*controlling*)

Menurut Daryanto (2013:90) pengawasan (*controlling*) adalah proses pengamatan dari sebuah kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Terdapat tiga tahap dalam proses pengawasan yaitu: 1) penentuan standar hasil kerja; 2) pengukuran hasil pekerjaan; 3) koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi.

2.4 Manajemen Hubungan Masyarakat

Setiap kegiatan dalam organisasi membutuhkan manajemen, begitu juga dalam kegiatan hubungan masyarakat (*humas*) atau *humas relations* di lembaga pendidikan. Manajemen banyak diartikan sebagai ilmu dan seni untuk mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain. Ini berarti manajemen hanya dapat dilaksanakan apabila dalam pencapaian tujuan tersebut tidak hanya dilakukan seorang tetapi juga dilakukan lebih dari seorang dalam pencapaian tujuan.

Menurut Siagian dalam Nasution (2012:9) pengertian manajemen adalah sebagai proses menggerakkan orang lain untuk memperoleh hasil tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. "Proses" dalam manajemen merupakan bentuk kemampuan atau keterampilan memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Keterampilan

memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan organisasi. Karena itu dalam manajemen mencakup konsep kepemimpinan, *human relations* (hubungan manusia), pengembalian keputusan, manusia, sarana, dan kerjasama.

Selain itu hubungan masyarakat pada dasarnya merupakan bidang atau fungsi tertentu yang diperlukan setiap organisasi, sebagaimana objek dalam tulisan buku ini adalah lembaga pendidikan. *Public relations*, khususnya di lembaga pendidikan pada umumnya disebut hubungan masyarakat (humas).

Menurut kamus *Fund and Wagnel* dalam Anggoro (2011:21), pengertian humas adalah segenap kegiatan dan teknik/kiat yang digunakan organisasi atau individu untuk menciptakan atau memelihara suatu sikap dan tanggapan yang baik dari pihak luar terhadap keberadaan dan aktivitasnya.

Istilah “kiat” dalam definisi tersebut mengindikasikan, humas harus menggunakan metode dan teknik manajemen berdasarkan tujuan. Dalam mengajar tujuan tersebut semua hasil atau tingkat kemajuan yang telah dicapai harus diukur secara jelas, mengingat kegiatan humas merupakan kegiatan yang nyata.

Kemudian Samoës dalam Ruslan (2012:10) mengartikan humas (*public relations*) adalah: (a) Merupakan proses interaksi; (b) Sebagai fungsi manajemen; (c) Merupakan aktivitas di berbagai bidang ilmu; (d) Merupakan proses profesional dalam bidangnya; dan (e) Merupakan penggabungan berbagai disiplin ilmu.

Dapat disimpulkan, konsep humas dalam praktik merupakan konsep kebijaksanaan sosial, manajerial, administrasi, dan fungsional, konsep operasional dan integrasi, lingkungan, sistem komunikasi, teori, dan pola berpikir.

Beberapa definisi ini ditulis untuk memberikan gambaran apa sebenarnya konsep humas tersebut. Memang terdapat banyak definisi humas dari beberapa ahli komunikasi dan praktisi humas dari konsep operasional dan integrasi, lingkungan, sistem komunikasi, teori, dan pola berpikir.

Untuk mengantisipasi definisi humas yang beragam tersebut *International Public Relations Association (IPRA)* yakni persatuan para ahli dan praktisi *public relations* (humas) memberikan definisi kerja *public relations* (humas) adalah fungsi manajemen yang khas yang mendukung pembinaan dan pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dengan publiknya mengenai komunikasi, pengertian, penerimaan dan kerjasama, melibatkan penerangan dan tanggapan dalam hubungan dengan opini publik; menetapkan dan menekankan tanggung jawab manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif, bertindak sebagai sistem peringatan yang dini dalam membantu kecenderungan, dan menggunakan penelitian serta teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai sarana utama.

Berdasarkan definisi tersebut pengertian humas secara umum dapat diartikan “sebagai fungsi manajemen yang khas antara organisasi dengan publiknya, atau dengan kata lain antara lembaga pendidikan dengan publik internal (dosen/guru, karyawan, dan mahasiswa/siswa), dan publik eksternal (orangtua mahasiswa/siswa, masyarakat dan institusi luar).

Berdasarkan pengertian manajemen dan pengertian humas tersebut dapat ditarik pengertian kedua konsep tersebut yakni definisi manajemen humas. Menurut Ruslan dalam Nasution (2012:11) manajemen humas adalah “suatu proses dalam menangani perencanaan, pengorganisasian, mengkomunikasikan

serta pengkoordinasian yang secara serius dan rasional dalam upaya pencapaian tujuan yang secara serius dan rasional dalam upaya pencapaian tujuan bersama dari organisasi atau lembaga yang diwakilinya”.

Oleh sebab itu, kegiatan humas di lembaga pendidikan tidak terlepas dari manajemen, dan begitu juga manajemen tidak mungkin berjalan sebagaimana yang diharapkan tanpa adanya humas.

2.4.1 Pengertian Humas

Berbicara tentang humas pasti ingatan kita akan tertuju pada hal yang berhubungan dengan komunikasi, konferensi pers, informasi, *public relation*. Pokoknya secara gampang diibaratkan sebagai penyampaian segala informasi. Menurut Anggoro dalam Nasution (2012:9) pengertian humas adalah segenap kegiatan dan teknik/kiat yang digunakan organisasi atau individu untuk menciptakan atau memelihara suatu sikap dan tanggapan yang baik dari pihak luar terhadap keberadaan dan aktivitasnya. Sedangkan pengertian humas dalam pendidikan adalah rangkaian pengelolaan yang berkaitan dengan kegiatan hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat (orang tua murid) yang dimaksudkan untuk menunjang proses belajar mengajar di lembaga pendidikan bersangkutan.

Berdasarkan definisi di atas pengertian humas secara umum adalah fungsi yang khas antara organisasi dengan publiknya, atau dengan kata lain antara lembaga pendidikan dengan warga di dalam (guru, karyawan, siswa) dan warga dari luar (wali siswa, masyarakat, institusi luar, partner sekolah). Dalam konteks ini jelas bahwa humas atau *public relation* adalah termasuk salah satu elemen yang penting dalam suatu organisasi kelompok ataupun secara individu.

2.4.2 Ruang Lingkup Manajemen Humas

Menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar (2012:12) ruang lingkup manajemen humas meliputi: analisis kebutuhan sekolah, penyusunan program humas, pembagian tugas pelaksana, pelaksanaan kegiatan humas, serta pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan humas di sekolah.

1. Analisis Kebutuhan

Menurut Iriantara (2013:82) dalam melakukan analisis kebutuhan ini ada tiga kegiatan utama yaitu; 1) mendeteksi permasalahan; 2) program humas yang terkait dengan pengembangan program pendidikan; 3) Isu-isu di sekolah saat ini. Analisis kebutuhan sekolah dan kebutuhan masyarakat perlu menjadi perhatian bagi pengelola sekolah dalam kerangka hubungan sekolah dan masyarakat. Masyarakat mau membantu sekolah apabila mereka merasakan kebutuhannya terpenuhi. Demikian juga sekolah memiliki sejumlah kebutuhan pemecahan masalah dan pengembangan lembaga yang pemenuhannya perlu melibatkan masyarakat. Untuk itu perlu kegiatan analisis kebutuhan pemecahan masalah yang melibatkan masyarakat dan analisis kebutuhan pengembangan lembaga yang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya.

Menganalisis kebutuhan perlu dilakukan pertemuan antara sekolah dan masyarakat yang terkait dengan program pendidikan atau seringkali disebut dengan *stakeholders*. Komite sekolah merupakan wahana yang bisa digunakan untuk kegiatan ini.

Sekolah dapat memerankan fungsinya secara maksimal bila didukung oleh semua komponen yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan yaitu keluarga, pemerintah dan masyarakat. Sementara ini secara umum yang

sudah relatif berjalan baik yaitu keterlibatan keluarga (orang tua siswa) dan pemerintah dalam menyediakan sumber daya untuk pelaksanaan pendidikan. Sedangkan pihak masyarakat yang terorganisasi dan masyarakat secara luas belum optimal keterlibatannya.

Mengelola pendidikan, sekolah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan. baik yang berwujud materiil maupun non materiil. Dalam hal ini pemerintah daerah bertanggung jawab mendorong dan atau mengatur kerjasama yang saling menguntungkan antara dunia usaha dan dunia pendidikan.

2. Penyusunan Program Humas

Penyusunan program humas dilaksanakan dengan melibatkan warga sekolah dan masyarakat. Perencanaan program pada dasarnya merupakan proses penetapan kegiatan di masa akan datang dengan mengatur berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang seoptimal mungkin sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Di dalam pembuatan program ada aktivitas merumuskan program, merumuskan indikator keberhasilan, menetapkan kegiatan, merinci kegiatan, dan menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan. Program diupayakan dibuat dalam jangka panjang yaitu untuk 5 tahun dan jangka pendek 1 tahun. Rumusan program yang matang akan menghasilkan suatu program kerja yang efektif sesuai dengan visi dan tujuan yang akan dicapai dan misi yang diemban oleh lembaga yang bersangkutan.

3. Pembagian Tugas Pelaksana

Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan, maka pembagian tugas pelaksana perlu dilakukan agar semua kegiatan yang harus dilakukan ada yang bertanggung jawab melaksanakannya. Secara umum kebijakan terkait bidang kehumasan menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Namun dalam pelaksanaannya beberapa tugas dilimpahkan kepada guru dan tenaga administrasi sekolah.

4. Pelaksanaan Kegiatan Humas

Pelaksanaan kegiatan humas dilaksanakan melalui berbagai teknik dan pendekatan. Kehumasan dalam MBS melibatkan semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan menekankan perlunya kerjasama dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari bekerjasama dengan masyarakat adalah mendorong masyarakat setempat supaya mereka merasa memiliki sekolah dan lebih berperan dalam kegiatan sekolah. Di beberapa sekolah, orang tua dan masyarakat telah membentuk paguyuban kelas untuk mendampingi kegiatan di kelas secara langsung, dan ada pula orang tua yang membantu guru di kelas.

Ada banyak teknik peningkatan kerjasama masyarakat dengan sekolah. Penerapan teknik yang berhasil memperhatikan komitmen masyarakat terhadap pendidikan. Masyarakat perlu dibangkitkan komitmennya dengan cara menyentuh hati mereka agar mereka merasa perlu pendidikan yang berkualitas. Pepatah Jawa mengatakan "*Jer basuki mawa bea*", setiap kegiatan membutuhkan biaya. Kalau ingin sesuatu yang baik maka membutuhkan biaya yang banyak. Pada dasarnya kalau pendidikan berkualitas maka yang memetik hasilnya juga masyarakat. Misalnya suatu sekolah yang menyelenggarakan pendidikan komputer dengan

baik, siswa-siswa mampu memprogram dan mengoperasikan komputer dengan baik, maka pihak pemakai lulusan dapat diuntungkan. Tenaga yang mampu dan terampil dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu perusahaan atau pengguna lulusan. Langkah awal agar masyarakat merasakan perlunya pendidikan yang berkualitas, perlu diterapkan pendekatan budaya, yaitu diupayakan masyarakat mengetahui dan mengenal pendidikan, meyakini manfaat pendidikan, dan percaya terhadap mutu pendidikan. Dengan proses ini diharapkan masyarakat merasa bahwa pendidikan mutlak diperlukan.

5. *Monitoring* dan evaluasi (Monev)

Monitoring kegiatan humas dilakukan oleh kepala sekolah bersama pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, orang tua siswa, pengurus komite sekolah, dan *stakeholders* lainnya. Evaluasi yang dilakukan bisa berbentuk saran melalui angket, komunikasi langsung melalui dialog dengan tokoh masyarakat, orang tua murid ataupun organisasi masyarakat yang ada di sekitar sekolah.

Hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan tolok ukur untuk meningkatkan kualitas hubungan sekolah dengan masyarakat sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Hasil dari kegiatan ini dilaporkan setiap kegiatan selesai dilakukan dan setiap akhir tahun.

2.4.3 Fungsi Manajemen Humas

Menurut Nasution (2012:11) pengertian manajemen, fungsi pokok atau tahapan-tahapan dalam manajemen meliputi: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengkoordinasian, pengarahan, dan pengawasan dalam konteks kegiatan di lembaga pendidikan.

a. Fungsi Perencanaan

Perencanaan meliputi kegiatan menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapai, berapa lama, berapa orang yang diperlukan, dan beberapa jumlah biayanya. Perencanaan ini dibuat sebelum suatu tindakan dilaksanakan. Perencanaan menurut Gibson, et al (2011) mencakup kegiatan menentukan sasaran dan alat sesuai untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan pada fungsi manajemen humas di lembaga pendidikan merupakan kesepakatan dan pengertian di antara personil lembaga pendidikan tentang apa yang harus dicapai organisasi.

Menurut Nasution (2012;12) jangkauan waktunya perencanaan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yakni : (a) perencanaan jangka pendek (satu minggu, satu bulan, dan satu tahun); (b) perencanaan jangka menengah (perencanaan yang dibuat untuk jangka waktu 2 sampai 5 tahun); dan (c) perencanaan jangka wpanjang (perencanaan yang dibuat lebih dari 5 tahun).

Menyusun perencanaan harus melibatkan banyak orang, yang harus menghasilkan program-program lembaga pendidikan, meliputi : program yang berpusat pada siswa, kurikulum, pembelajaran, supervisi, keuangan, sarana dan prasarana, kepegawaian, layanan khusus, hubungan masyarakat, dan lain-lainnya.

b. Fungsi Pengorganisasian

Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas-tugas orang yang terlibat dalam kerjasama di lembaga pendidikan. Kegiatan pengorganisasian bertujuan menentukan siapa yang akan melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip manajemen lembaga pendidikan. Fungsi pengorganisasian di sini meliputi : pembagian tugas kepada masing-masing pihak, membentuk bagian,

mendelegasikan, serta menetapkan wewenang dan tanggungjawab, sistem komunikasi. Sedangkan prinsip pengorganisasian adalah organisasi lembaga pendidikan mempunyai tujuan yang jelas, tujuan lembaga pendidikan dapat dipahami dengan jelas dan diterima setiap tenaga pengajar dan karyawan, termasuk siswa dan orangtua siswa.

c. Fungsi Penggerakan

Menggerakkan dalam hal ini merangsang anggota-anggota organisasi melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan kemauan yang baik. Menurut Davis (2012) menggerakkan adalah kemampuan pemimpin membujuk orang-orang mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan penuh semangat. Jadi, pemimpin lembaga pendidikan menggerakkan dengan semangat.

Tugas menggerakkan dilakukan pemimpin lembaga pendidikan, karena itu kepemimpinan lembaga pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan karyawan, tenaga pengajar melaksanakan program kerja.

d. Fungsi Pengkoordinasian

Pengkoordinasian berarti menjaga agar masing-masing tugas-tugas yang telah diberi wewenang dan tanggung jawab dikerjakan sesuai dengan aturan dalam mencapai tujuan. Menurut Gie dalam Nasution (2012:11) pengkoordinasian adalah rangkaian aktivitas menghubungkan, menyatupadukan, dan menyelaraskan orang-orang dan pekerjaannya sehingga semuanya berlangsung secara tertib dan seirama menuju ke arah tercapaian tujuan tanpa terjadi kekacauan, percekocokan, dan kekosongan kerja.

Pengertian tersebut dapat ditegaskan, pengkoordinasian pada lembaga pendidikan adalah mempersatukan rangkaian aktivitas penyelenggaraan di lembaga pendidikan dan pembelajaran dengan menghubungkan dan menyelaraskan orang-orang dan pekerjaannya sehingga semua berlangsung secara tertib ke arah tercapainya maksud yang telah ditetapkan. Koordinasi dapat diwujudkan dengan cara : rapat lengkap, pertemuan berkala, pembentukan panitia jika diperlukan, wawancara kepada bawahan, dan instruksi, sehingga kemampuan kepemimpinan lembaga pendidikan dalam mengorganisasikan program kerja lembaga pendidikan menjadi demikian penting.

e. Fungsi Pengarahan

Pengarahan dilakukan agar kegiatan yang dilakukan bersama tetap melalui jalur yang ditetapkan, tidak terjadi penyimpangan yang dapat menimbulkan terjadinya pemborosan. Menurut Sagala (2012:12) kegiatan pengarahan antara lain : (a) memberikan petunjuk dalam melaksanakan suatu kegiatan; (b) memberikan dan menjelaskan perintah; (c) memberikan kesempatan meningkatkan pengetahuan kepada pegawai agar dalam lebih efektif dalam melaksanakan tugas; (d) memberikan kesempatan ikut serta menyumbangkan tenaga dan pemikiran; (e) memberikan koreksi agar setiap personil melaksanakan tugas-tugas secara efisien.

Sebagai pengarah para pimpinan lembaga pendidikan tersebut berada pada tingkat pimpinan eksekutif tertinggi pada lembaga pendidikan tersebut.

f. Fungsi Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai salah satu kegiatan untuk mengetahui realisasi perilaku tenaga pengajar dan karyawan dalam organisasi lembaga pendidikan. Secara umum pengawasan dikaitkan dengan upaya pengendalian kualitas pendidikan. Menurut Johnson dalam Nasution (2012:11) mengemukakan, pengawasan merupakan fungsi sistem yang melakukan penyesuaian terhadap rencana, mengusahakan agar penyimpangan-penyimpangan tujuan sistem hanya dalam batas-batas yang dapat ditoleransi. Pendapat tersebut menegaskan, pengawasan sebagai kendali *performance* petugas, proses, dan output sesuai dengan rencana, walaupun ada penyimpangan hal itu diusahakan agar tidak lebih dari batas yang dapat ditoleransi (Pidarta, 1988).

2.4.4 Hubungan Masyarakat dengan Sekolah

Istilah masyarakat menunjuk pada kumpulan orang-orang yang hidup dalam hubungan yang akrab satu sama lain, yaitu pergaulan hidup manusia atau sehimpunan orang-orang yang hidup bersama di suatu tempat dengan ikatan-ikatan dan aturan-aturan tertentu. Menurut Soekanto (2011:149) istilah "*community*" dapat diterjemahkan sebagai "masyarakat setempat", istilah yang menunjukkan pada warga sebuah desa, kota, suku atau bangsa. Apabila anggota-anggota suatu kelompok, baik kelompok itu besar atau kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama, maka kelompok tadi disebut masyarakat setempat.

Dilihat dari sisi maknanya, hubungan sekolah dan masyarakat memiliki pengertian yang sangat luas sehingga masing-masing ahli memiliki persepsi yang berbeda-beda hal ini tentu saja disebabkan oleh sudut pandang yang berbeda-beda, seperti yang diungkapkan bahwa “hubungan masyarakat dengan sekolah merupakan komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerja sama serta pemenuhan kepentingan bersama” (*International Public Relation Association*).

Menurut Rohiat (2012:28) hubungan sekolah dan masyarakat dilakukan untuk menjembatani kebutuhan yang dibutuhkan oleh sekolah dan masyarakat itu sendiri. Sekolah melakukan komunikasi dengan masyarakat agar memahami kebutuhan pendidikan dan pembangunan masyarakat. Hubungan sekolah dan masyarakat dapat dikatakan untuk menjaga dan mengembangkan seluruh informasi dua arah yang efisien serta saling pengertian antara sekolah, personil sekolah, dan anggota masyarakat

Uraian-uraian di atas dapat dipahami bahwa hubungan dengan masyarakat bagi suatu sekolah adalah hubungan dua arah antara sekolah dengan masyarakat untuk memusyawarakan ide-ide dan informasi-informasi tertentu yang berguna bagi peningkatan pendidikan.

Sekolah merupakan sistem terbuka terhadap lingkungannya termasuk masyarakat pendukungnya. Oleh karena itu, sekolah selalu membukakan pintu terhadap warga masyarakat terhadap ide-ide mereka, terhadap kebutuhan-kebutuhan mereka, dan terhadap nilai-nilai yang ada di masyarakat. Sebaliknya masyarakat membuka diri untuk memasuki atau aktivitas-aktivitas sekolah-

sekolah juga dapat belajar dari masyarakat, guru-guru dan para siswa dapat mencari pengalaman, belajar dan praktek di masyarakat. Antara Sekolah dan masyarakat terjadi komunikasi dua arah untuk bisa saling memberi dan saling menerima. Sebagian besar masyarakat modern memandang lembaga-lembaga pendidikan sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan sosial.

Pemerintah bersama orang tua telah menyediakan anggaran pendidikan yang diperlukan secara besar-besaran untuk kemajuan sosial dan pembangunan bangsa. Untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang berupa nilai-nilai luhur yang harus dilestarikan seperti rasa hormat kepada orang tua, kepada pemimpin, kewajiban untuk mematuhi hukum-hukum dan norma-norma yang berlaku, jiwa patriotisme, dan sebagainya.

Pendidikan juga diharapkan untuk memupuk rasa takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa meningkatkan kemajuan-kemajuan dan pembangunan politik, ekonomi, sosial dan pertahanan keamanan. Pendek kata pendidikan dapat diharapkan untuk mengembangkan wawasan anak terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan secara tepat dan benar, sehingga membawa kemajuan pada individu masyarakat dan negara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Berbagai persoalan yang dihadapi oleh dunia pendidikan sampai lembaga pendidikan sampai lembaga pendidikan di era globalisasi dan desentralistik (otonomi daerah) menuntut team work yang solid antara pihak sekolah itu sendiri dengan pihak luar, baik instansi atasan maupun masyarakat melalui Manajemen Berbasis Sekolah, maka administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat menjadi kunci sukses didalamnya. Dan ketika hubungan sekolah dengan masyarakat ini

dapat berjalan harmonis dan dinamis dengan sifat pedagogi, sosiologis dan produktif, maka diharapkan tercapai tujuan utama yaitu terlaksananya proses pendidikan di sekolah secara produktif, efektif, efisien dan berhasil sehingga menghasilkan output yang berkualitas secara intelektual, spiritual dan sosial.

2.4.5 Manajemen Hubungan Sekolah dengan Masyarakat SD

Tahap manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan tahap melakukan hubungan agar, hubungan sekolah dengan masyarakat dapat bekerja sama sesuai dengan yang direncanakan. Tahap manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat SD terdiri dari langkah-langkah berikut ini:

a. Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan sekolah dan kebutuhan masyarakat perlu menjadi perhatian bagi pengelola sekolah dalam kerangka hubungan sekolah dan masyarakat. Masyarakat mau membantu sekolah apabila mereka merasakan kebutuhannya terpenuhi, dalam melakukan analisis kebutuhan ini ada tiga kegiatan utama yaitu; 1) mendeteksi permasalahan; 2) program humas yang terkait dengan pengembangan program pendidikan; 3) Isu-isu di sekolah saat ini.

b. Penyusunan Program

Penyusunan program merupakan suatu arah dan batasan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Esensi dari kegiatan penyusunan program hubungan sekolah dengan masyarakat sekolah dasar adalah: 1) menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan; 2) tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan; 3) waktu dan biaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

c. Pembagian Tugas Pelaksana

Pembagian tugas pelaksana adalah suatu proses tindak lanjut dari penyusunan program. Pembagian tugas pelaksana hubungan sekolah dengan masyarakat sekolah dasar meliputi langkah: 1) pemerincian seluruh pekerjaan yang harus dilakukan ; 2) pembagian beban pekerjaan; 3) pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengordinasi pekerjaan para anggota organisasi menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis.

d. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan humas dilaksanakan melalui berbagai teknik dan pendekatan. Kehumasan dalam MBS melibatkan semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan menekankan perlunya kerjasama dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari bekerjasama dengan masyarakat adalah mendorong masyarakat setempat supaya mereka merasa memiliki sekolah dan lebih berperan dalam kegiatan sekolah, lalu diadakan pengarahan. Elemen-elemen pengarahan dalam manajemen adalah: 1) *Coordinating* yaitu proses mengintegrasikan, menyingkronisasikan, dan menyederhanakan pelaksanaan tugas yang terpisah-pisah secara terus menerus untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, 2) *Motivating* yaitu keinginan yang terdapat pada seseorang individu yang merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang berperilaku. 3) *Communication* yaitu proses penyampaian atau penerimaan pesan dari satu orang ke orang lain baik langsung ataupun tidak langsung, secara tertulis, lisan, ataupun nonverbal. 4) *Commanding* yaitu menjelaskan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang akan yang ditempuh

oleh organisasi dalam usaha pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi. Menurut Usman (2013:276) pengarahan dan penggerakan merupakan usaha untuk menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha mencapai sasaran organisasi yang bersangkutan dan anggota organisasi tersebut oleh karena anggota itu ingin mencapai sasaran tersebut.

e. **Monitoring dan Evaluasi**

Setelah program diterapkan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program untuk mengetahui ketercapaian tujuan suatu program dan menemukan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Monitoring dan evaluasi manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat sekolah dasar terdiri dari tiga tahap yaitu: 1) penentuan standar hasil kerja; 2) pengukuran hasil pekerjaan; 3) koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi.

2.4.6 Tujuan Hubungan Sekolah dengan Masyarakat

Hubungan sekolah dengan masyarakat dibangun dengan tujuan popularitas sekolah di mata masyarakat. Popularitas sekolah akan tinggi jika mampu menciptakan program-program sekolah yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan dan cita-cita bersama dan dari program tersebut mampu melahirkan sosok-sosok individu yang mapan secara intelektual dan spiritual. Dengan popularitas ini sekolah eksis dan semakin maju.

Sedangkan menurut Mulyasa (2007:50), tujuan dari hubungan dengan masyarakat adalah : (a) memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik, (b) memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan

penghidupan masyarakat; dan (c) mengarahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah.

2.5 Peran Komite Sekolah

Komite sekolah berperan menjembatani kepentingan antara masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan. Komite sekolah diharapkan mampu membantu kinerja kepala sekolah guna meningkatkan mutu pendidikan dan menjadi wadah pemecahan masalah yang dihadapi penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan dan komite sekolah saling bekerjasama secara sinergis untuk membangun kualitas layanan pendidikan. Peran dan dukungan masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam menentukan kebijakan dan program sekolah

Menurut Rini (2011:69) komite sekolah merupakan perwujudan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, dengan kata lain bahwa masyarakat tidak lagi hanya sebagai pengguna (*user*) akan tetapi juga menjadi pengelola, penyelenggara, dan pengontrol, mutu pendidikan di sekolah.

Komite sekolah diharapkan menjadi mitra sekolah yang dapat menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan. Masyarakat yang dimaksud adalah seluruh unsur di dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pendidikan.

Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003 pada bab XV tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan pasal 54 diamanatkan bahwa: 1) peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan

organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan; 2) masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan penggunaan hasil pendidikan.

Pasal 56 ayat 1 diuraikan tentang masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. Dalam ayat 3 diuraikan tentang komite sekolah/madrasah sebagai lembaga yang mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Peran serta masyarakat dirumuskan dalam PP 17 tahun 2010 pasal 188 ayat 2 bahwa masyarakat menjadi sumber pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Oleh karena itu masyarakat mempunyai peran dalam bentuk (a) penyediaan sumberdaya pendidik, (b) penyelenggara satuan pendidikan, (c) pengguna hasil pendidikan, (d) pengawasan penyelenggara pendidikan (e) pengawasan pengelolaan pendidikan, (f) pemberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya, (g) pemberi bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.

Adapun peran komite sekolah secara khusus yang termuat dalam kepmendiknas no 044/U/2002 adalah sebagai berikut:

1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
2. Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

3. pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
4. Mediator antara pemerintah (*eksekutif*) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan perlu mendapat dukungan dari seluruh komponen pendidikan, baik guru, kepala sekolah siswa, orang tua/wali, masyarakat, institusi pendidikan. Oleh karena itu perlu kerjasama dan koordinasi yang di antara komponen pendidikan tersebut sehingga upaya peningkatan mutu pendidikan yang dilaksanakan dapat efektif dan efisien.

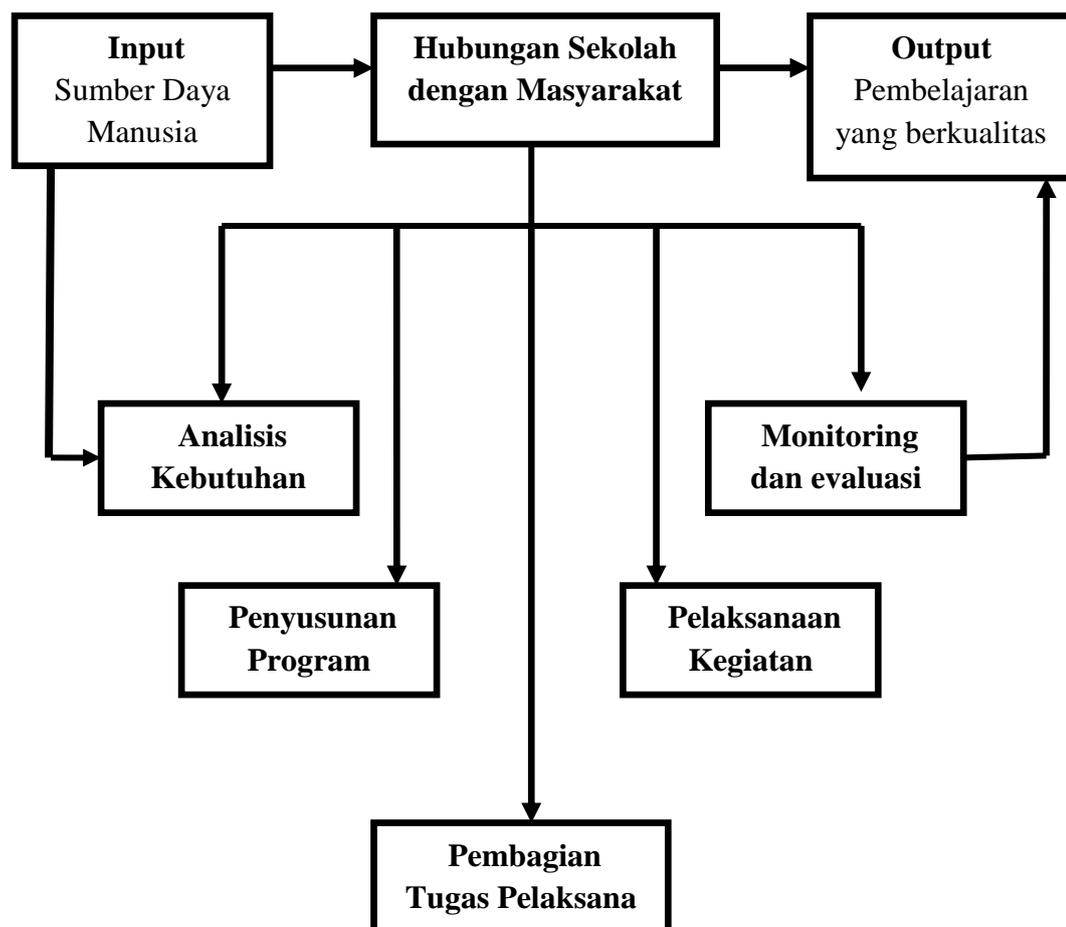
2.6 Kerangka Pikir

Sekolah merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa sub sistem yang saling terkait satu sama lain. Sub sistem tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar yaitu: input, proses dan output. Input dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia seperti: kepala sekolah, guru, siswa, komite sekolah, wali murid/masyarakat dan TU, sedangkan proses meliputi analisis kebutuhan sekolah, penyusunan program, pembagian tugas pelaksana, pelaksanaan kegiatan, dan *monitoring* dan evaluasi. Output dalam penelitian ini adalah lulusan yang memiliki kompetensi yang bagus serta Tercapainya pembelajaran yang berkualitas berdampak pada mutu sekolah lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat/wali murid.

Kerangka pikir penelitian ini adalah jika sumber daya manusia diimplementasikan di dalam manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat dan diterjemahkan dengan tepat di dalam analisis kebutuhan sekolah, penyusunan program, pembagian tugas pelaksana, pelaksanaan kegiatan, dan *monitoring* dan

evaluasi, memperoleh dukungan secara optimal meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebutuhan sekolah, praktik pendidikan dan keterlibatan masyarakat melalui pengaturan kerjasama untuk mewujudkan tercapainya pembelajaran yang berkualitas berdampak pada mutu sekolah, maka akan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi serta dapat melanjutkan ke SMP Negeri yang bermutu dan dapat mewujudkan dalam keterampilan sesuai dengan dasar ilmu yang diterimanya, serta mutu sekolah lebih baik sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat/wali murid.

Kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian